

STUDI EVALUASI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU ¹⁾

Oleh :
Aladin Nasution ²⁾

Abstrak

Populasi ternak sapi dan kerbau yang menurun secara Nasional telah mendorong pemerintah untuk melancarkan program-program yang diharapkan dapat merubah trend yang terjadi. Pengembangan kedua jenis ternak ini terutama diarahkan bagi penyediaan daging dan tenaga kerja. Pada wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau diperlukan suatu program yang mantap dan terarah sehingga pengembangan yang dilakukan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas seperti yang diharapkan. Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau ini bersifat evaluatif dan diarahkan pada pembahasan program-program pengembangan ternak sapi dan kerbau pada tingkat Nasional dan Propinsi/Kabupaten contoh. Studi ini mengambil dua lokasi pengembangan ternak sapi dan kerbau yaitu Propinsi Lampung dan Jawa Barat. Ciri yang berbeda antara kedua lokasi diatas diharapkan akan memberikan suatu gambaran permasalahan yang lebih luas. Dari hasil studi yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa hal berikut. Pada tingkat nasional perkembangan sapi dan kerbau yang kurang memuaskan telah menimbulkan respon yang kuat untuk menanggulangnya. Peningkatan kegiatan penyebaran ternak sapi sebagai pelaksanaan program ekstensifikasi mempunyai sasaran utama pada wilayah-wilayah potensial di luar Jawa. Peranan pemerintah dalam pengadaan dan penyebaran ternak bibit bersifat esensial.

I. PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup pembangunan sub-sektor peternakan masalah pengembangan ternak sapi dan kerbau mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Populasi sapi dan kerbau yang menurun secara Nasional mendorong pemerintah untuk melancarkan program-program yang diharapkan dapat merubah trend yang terjadi. Pengembangan kedua jenis ternak ini terutama diarahkan bagi penyediaan daging dan tenaga kerja khususnya di daerah-daerah yang langka tenaga kerja manusia dan ternak seperti daerah transmigrasi di luar pulau Jawa.

Hampir seluruh ternak sapi dan kerbau yang terdapat di Indonesia dikuasai dan dipelihara oleh petani peternak sebagai bagian dari usahatani. Dalam hubungan ini dapat dipahami bila program pemerintah dalam pengembangan ternak sapi dan kerbau mempunyai sasaran utama petani peternak (*small holders*).

Wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau diperlukan program yang mantap dan terarah dalam pengem-

bangannya tanpa mengabaikan faktor lingkungan dan kondisi setempat. Pada wilayah yang secara tradisional merupakan daerah peternakan sapi dan kerbau arah pengembangannya lebih ditekankan dalam peningkatan produktivitas dan pengkhususan produksi sehingga terdapat pembagian wilayah pengembangan yang jelas, misalnya wilayah pembibitan atau wilayah penggemukan.

Inisiatif pemerintah dalam program penyebaran ternak, khususnya sapi telah lama dimulai walaupun dengan skala penyebaran yang relatif terbatas. Pada periode PELITA III terlihat suatu program penyebaran sapi dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya dan kelihatannya akan terus dilanjutkan pada PELITA IV. Program yang melibatkan dana investasi yang cukup tinggi ini diperoleh dana dari berbagai sumber anggaran baik anggaran dalam negeri maupun bantuan luar negeri.

¹⁾ Naskah Studi Evaluasi Pengembangan Ternak Sapi dan Kerbau di sunting dari laporan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Pusat Penelitian Agro Ekonomi.

²⁾ Staf Peneliti pada Puslit Agro Ekonomi.

Program yang menyangkut peternakan sapi dan kerbau yang telah sedemikian berkembang bila dilihat dari segi volume anggaran dirasakan masih diliputi berbagai permasalahan. Suatu permasalahan penting yang secara luas disadari, menyangkut masalah pembinaan dan pelayanan terhadap petani peternak yang seyogyanya harus dapat secara efektif dilaksanakan untuk memungkinkan tercapainya tujuan pengembangan ini.

II. METODOLOGI

Kebijaksanaan dan strategi dalam pengembangan ternak-ternak sapi dan kerbau telah menunjukkan perkembangan selama ini dan pada dasarnya menunjukkan hal-hal berikut;

1. Peningkatan produksi peternakan sapi dan kerbau ditujukan pada,
 - a. Memelihara tingkat perkembangan di wilayah-wilayah produksi yang telah ada sejak dulu.
 - b. Mengembangkan wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan ternak sapi dan kerbau.
2. Pengembangan usaha dalam bentuk ladang ternak (*ranch*) dengan berbagai skala akan dikembangkan di daerah yang potensial dengan kepadatan penduduk yang rendah.
3. Pengembangan ternak sapi dan kerbau yang diintegrasikan dengan usaha tani (*small holders*) akan dikembangkan di daerah pertanian termasuk daerah transmigrasi.
4. Peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau ditempuh dengan,
 - a. Program Intensifikasi, meningkatkan hasil persatuan ternak.
 - b. Program Ekstensifikasi, meningkatkan populasi ternak dan jumlah usaha peternakan.

Untuk menunjang kedua program tersebut diterapkan kombinasi peralatan kebijaksanaan yang meliputi kesehatan hewan, bibit ternak, makanan ternak, penyuluhan, pemasaran, kredit dan koperasi.

Studi yang dilakukan diarahkan untuk mempelajari :

1. Pelaksanaan pengembangan ternak sapi dan kerbau secara nasional.
2. Pelaksanaan pengembangan ternak sapi dan kerbau di dua lokasi yaitu (a) Propinsi Lam-

pung, (b) Propinsi Jawa-Barat dan secara khusus juga melihat kasus Kabupaten Sukabumi.

Ciri-ciri yang berbeda antara kedua lokasi yang disebut di atas diharapkan akan memberikan gambaran permasalahan yang lebih luas. Sebagai contoh permasalahan ternak kerbau seyogyanya akan dapat diungkapkan dari Jawa-Barat, sedangkan permasalahan penyebaran ternak dan kerbau di daerah transmigrasi akan banyak diungkapkan dari kasus Lampung.

Penelitian yang dilakukan bersifat evaluatif dan diarahkan pada pembahasan program-program pengembangan ternak sapi dan kerbau pada tingkat nasional dan propinsi/kabupaten contoh dengan fokus utama mengenai;

1. Peralatan kebijaksanaan pengembangan yang diterapkan.
2. Pola-pola pembinaan yang bersifat operasional.
3. Hasil-hasil yang telah dicapai dan permasalahan-permasalahan yang masih memerlukan pemikiran.

PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU DI INDONESIA

Program pengembangan

Program peningkatan produksi peternakan dalam Pelita III ditempuh melalui program ekstensifikasi (peningkatan populasi ternak) dan program intensifikasi (peningkatan produksi per satuan ternak). Pemwilayahan kedua program tersebut disajikan pada Tabel 1. Untuk setiap propinsi dan wilayah pengembangan utama, urutan prioritas programnya ditekankan atas dasar potensi wilayah dihubungkan dengan kemungkinan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Program ekstensifikasi mempunyai penekanan pada peningkatan populasi ternak yang berdasarkan pada pengamatan kondisi saat ini. Dilakukan melalui peningkatan jumlah usahatani yang memelihara ternak. Untuk itu program ekstensifikasi perlu didukung oleh perangkat, (a) pengadaan dan peningkatan mutu bibit, (b) penanggulangan penyakit dan parasit ternak, (c) penyuluhan, (d) perkreditan, (e) pengadaan hijauan dan (f) pemasaran.

Tabel 1. Urutan Prioritas Program Ekstensifikasi (E) dan Intensifikasi (I) Peternakan Sapi dan Kerbau di tiap Propinsi dan Wilayah Pengembangan Utama

Wilayah/Propinsi	Program Pengembangan	
	Sapi	Kerbau
1. Daerah Istimewa Aceh	E, I	E, I
2. Sumatera Utara	I, E	E, I
3. Sumatera Barat	E, I	E
4. Riau	E	E
WPU A	E, I	E, I
5. Jambi	E	E
6. Sumatera Selatan	E, I	I, E
7. Bengkulu	E	E
8. Lampung	E, I	E
9. DKI Jakarta	I	I
10. Jawa-Barat	I	I, E
11. Jawa-Tengah	I	I, E
12. D.I.-Yogyakarta	I	—
13. Kalimantan Barat	E, I	—
WPU B	I, E	I, E
14. Jawa Timur	I	I, E
15. Kalimantan Tengah	E	E
16. Kalimantan Selatan	E, I	E
17. Kalimantan Timur	E, I	E
18. Bali	I	E, I
WPU C	I, E	E, I
19. Sulawesi Utara	E, I	—
20. Sulawesi Tengah	E, I	E
21. Sulawesi Tenggara	E, I	E
22. Sulawesi Selatan	E, I	E, I
23. NTB	I, E	I, E
24. NTT	I, E	E, I
25. Maluku	E	E
26. Irian Jaya	E	—
27. Timor Timur	E	E
WPU D	E, I	E, I
INDONESIA	I, E	E, I

Sumber : Pokok-pokok Kebijaksanaan Operasional Peternakan Pembangunan Peternakan di Wilayah Pembangunan Utama A, B, C, dan D di dalam Repelita III (1979 - 1983).

Direktorat Jenderal Peternakan, Jakarta.

Program intensifikasi menekankan pada usaha meningkatkan produksi persatuan ternak yang dapat dilakukan dengan peningkatan praktek budidaya peternakan. Peningkatan produksi yang secara ekonomis layak akan memerlukan kombinasi-kombinasi tertentu daripada bibit ternak, makanan ternak dan manajemen. Jika pada produksi ternak lain seperti ayam ras telah terlihat proses alih teknologi maka pada peternakan sapi dan kerbau hal tersebut belum terlihat.

Kelihatannya intensifikasi akan mengambil jalur perkembangan yang lebih gradual dan akan lebih mengandalkan pada teknologi yang dikembangkan sendiri di Indonesia.

Kegiatan inseminasi buatan yang telah dilaksanakan secara intensif dan meluas di beberapa daerah dapat diperkirakan akan mempunyai efek terhadap produktivitas yang sangat penting. Pengembangan ternak sapi dalam bentuk ladang (ranch) sudah terlihat eksistensinya di beberapa daerah tetapi belum terlihat peranannya dilihat dari keseluruhan tujuan pengembangan.

Kegiatan Pengembangan

Gambaran Umum Kegiatan

Gambaran menyeluruh mengenai kegiatan pengembangan peternakan dapat diungkapkan dari struktur anggaran pembangunan Direktorat Jenderal Peternakan yang disajikan pada Tabel 2 berikut ;

Tabel 2. Struktur Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 1982/1983

Program/Proyek	Jumlah Anggaran (Rp. 000)
1. Program Peningkatan Produksi Peternakan	
terdiri atas proyek-proyek :	15375000
1.1. Pembinaan Peternakan Pusat	600000
1.2. Pengamanan Ternak Pusat	350000
1.3. Panca Usaha Ternak Pusat	225000
1.4. Produksi Semen Beku Singosari	200000
1.5. Produksi Semen Beku Bandung	160000
1.6. Pengembangan Peternakan Kalimantan Selatan (ADB)	1700000
1.7. Peningkatan Produksi Peternakan di 26 propinsi	7460000
1.8. Penyebaran dan Pengembangan Pusat	125000
1.9. Proyek Pengadaan Bibit Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusatenggara Timur, Jawa-Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan)	1525000
1.10. Proyek Pengembangan Smallholder (IFAD)	850000
1.11. Penyidikan Penyakit Hewan (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan)	730000

Tabel 2. Struktur Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 1982/1983

Program/Proyek	Jumlah Anggaran (Rp. 000)
1.12. Pengembangan Pusat Veterinaria Farma Wonocolo	950000
1.13. Pembibitan sapi Bali	100000
1.14. Pembinaan Karantina Hewan di 5 wilayah	400000
2. Program Transmigrasi; terdiri atas proyek-proyek;	5300000
2.1. Pembinaan Ternak Transmigrasi di Pusat.	225000
2.2. Pembinaan Ternak Daerah Transmigrasi di 18 Propinsi	3975000
2.3. South East Sulawesi Transmigra- tion and Area Development (SESTADP)	1100000
3. Program Pengembangan Desa; terdiri atas proyek-proyek;	1800000
3.1. Bantuan Pengembangan Aneka Ternak di Desa Rawan di 10 Propinsi	1700000

Tabel 2. Struktur Anggaran Pembangunan Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 1982/1983

Program/Proyek	Jumlah Anggaran (Rp. 000)
3.2. Perencanaan dan Pengendalian Bantuan Pengembangan Aneka Ternak di Desa Rawan	100000
4. Program Peningkatan Statistik	80000
5. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Peng- awasan	75000
6. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah	70000
7. Program Penyertaan Modal Pemerin- tah dan Pengembangan Golong- an Ekonomi Lemah	125000
Total Anggaran	22825000

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan.

Tabel 3. Sebaran Jumlah Transmigrasi dan Jumlah Ternak Kerja di daerah Trans-
migrasi

Propinsi	Jumlah		Pro- yek	Jumlah Trans- migran (KK)	Jumlah Ternak Kerja (ekor)	Kepadatan Ternak Kerja (ekor/ 1000 KK)
	Kab	Kec				
1. D.I. Aceh	3	3	3	5300	560	105.66
2. Sumatera Utara	1	1	1	1000	702	702.00
3. Sumatera Barat	3	5	5	6750	8721	1292.00
4. Riau	4	7	8	23000	2946	128.09
5. Jambi	4	7	9	17559	2128	121.19
6. Bengkulu	1	2	6	9236	1606	173.88
7. Sumatera Selatan	4	4	14	49950	4791	95.92
8. Lampung	1	5	5	16618	2300	138.40
9. Kalimantan Barat	3	3	5	8000	1473	184.13
10. Kalimantan Tengah	3	3	8	6000	615	102.50
11. Kalimantan Selatan	4	5	8	17050	4827	283.11
12. Kalimantan Timur	3	3	3	6900	3245	470.29
13. Sulawesi Utara	1	1	4	2050	1859	906.83
14. Sulawesi Tenggara	3	4	7	12200	2858	234.26
15. Sulawesi Selatan	1	3	4	3900	2354	603.59
16. Sulawesi Utara	3	6	10	12500	1770	141.60
17. Maluku	1	1	1	4000	2947	736.75
18. Irian Jaya	4	5	5	4650	1454	312.69
Jumlah	47	68	106	206663	47156	228.18

Keterangan : Data diperoleh dari "Bahan Informasi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan", Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan, September 1981.

Kegiatan Penyebaran Ternak

Kegiatan penyebaran bibit ternak sapi dan kerbau telah dilakukan sejak lama. Bangsa-bangsa ternak sapi lokal domestik seperti sapi Bali, PO dan SO merupakan bangsa-bangsa sapi yang terbanyak disebar. Pada tahun yang lebih akhir dengan meningkatnya volume penyebaran sapi dilakukan pula penyebaran sapi impor seperti *Brahman*, *Santa Gertrudis* dan *Hereford*. Impor sapi bibit ini selain dimaksud untuk peningkatan mutu bibit juga dimaksud untuk menutupi kekurangan bibit domestik.

Penyebaran Ternak di daerah Transmigrasi

Penyebaran ternak sapi dan kerbau di daerah transmigrasi merupakan pengisian program ekstensifikasi peternakan yang dikaitkan dengan penyediaan tenaga kerja pertanian. Kepadatan ternak kerja di daerah-daerah transmigrasi seperti diperlihatkan pada Tabel 3, secara umum terlihat rendah dan sasaran penyebaran terutama ditujukan pada daerah transmigrasi dengan potensi pertanian yang tinggi, tetapi dengan kepadatan ternak yang rendah.

KASUS PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU DI PROPINSI LAMPUNG

Situasi Pengembangan

Menurut hasil sensus Penduduk BPS tahun 1980 jumlah penduduk daerah Lampung adalah 4 622 247 jiwa. Sensus penduduk tahun 1971 menunjukkan jumlah penduduk sebesar 2 777 085 jiwa, sehingga laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 5.82 persen per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk dari keseluruhan luas daerah adalah 131 jiwa per km².

Sebagai daerah penempatan transmigrasi, selama tahun 1970-1978 tercatat penempatan transmigrasi sejumlah 17 739 KK yang meliputi 80 624 jiwa. Dari jumlah tersebut 81.3 persen ditempatkan di Kabupaten Lampung Utara, 12 persen di Lampung Tengah dan hanya 6.7 persen ditempatkan di Lampung Selatan.

Propinsi Lampung diharapkan untuk menjadi daerah pertanian yang penting dan dalam hal peternakan sapi dan kerbau dinilai mempunyai potensi yang cukup penting pula. Dari data BPS menunjukkan bahwa populasi sapi sejak tahun 1973 terlihat kecenderungan terjadinya penurunan populasi meskipun kemudian pada tahun-tahun akhir terjadi sedikit peningkatan. Untuk ternak kerbau terlihat adanya peningkatan populasi pada periode yang sama.

Sebaran populasi ternak sapi dan kerbau di Propinsi Lampung seperti yang tertera pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa ternak sapi terdapat terutama di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah yang merupakan daerah transmigrasi lebih dulu dan juga merupakan pertanian tanaman pangan. Di Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah perkebunan dan daerah penempatan transmigrasi belakangan populasi dan kepadatan ternak sapi lebih rendah bila dibanding dengan kedua Kabupaten lain. Ternak kerbau sebagian besar terdapat di Lampung Selatan dan Lampung Utara. Akan tetapi ke-

Tabel 4. Populasi Sapi dan Kerbau Propinsi Lampung Menurut Hasil Survey Biro Pusat Statistik

	SIH 1967	SP 1973	SVP 1975	SVP 1976	STN 1979
Sapi (ekor)	57700	84500	76000	74300	76490
Kerbau (ekor)	43400	24200	28100	27600	31165

Tabel 5. Sebaran dan Kepadatan Populasi Ternak Sapi dan Kerbau di Propinsi Lampung 1977/1978

Kabupaten	Ternak Sapi		Ternak Kerbau	
	Jumlah (ekor)	Kepadatan (ekor/km ²)	Jumlah (ekor)	Kepadatan (ekor/km ²)
1. Lampung Selatan	40790	6.03	42406	6.27
2. Lampung Tengah	66912	7.28	24352	2.65
3. Lampung Utara	7273	0.38	39285	2.03

Sumber : Inspektorat Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung.

padatan ternak kerbau di Lampung Utara tercatat paling rendah yang disebabkan karena daerahnya yang lebih luas jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Arah Pengembangan

Dari program yang telah ditetapkan arah pengembangan ternak sapi dan kerbau di daerah Lampung meliputi pokok-pokok berikut :

1. Penyebaran ternak sapi kepada petani peternak (*small holders*) di wilayah-wilayah yang potensial.
2. Pengembangan ternak kerbau dititik beratkan pada usaha-usaha mempertahankan populasi yang ada terutama melalui proyek-proyek kesehatan hewan.
3. Pengembangan fasilitas-fasilitas pemerintah untuk menunjang penyuluhan dan pelayanan kepada petani peternak.

Kegiatan Pengembangan

Secara umum kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan ternak sapi dan kerbau terlihat konsisten dengan kebijaksanaan pembangunan peternakan secara nasional yang tertuang dalam Repelita III. Khusus pengembangan ternak sapi di Propinsi Lampung dilakukan dengan penerapan secara terpadu dari peralatan-peralatan kebijakan (kesehatan hewan, bibit ternak, makanan ternak, penyuluhan, pemasaran, kredit dan Koperasi) melalui sistem BPSD.

Penerapan program BPSD ternyata memberi gambaran yang positif terutama dalam peningkatan

jumlah lokasi desa, jumlah sapi dan pengaduh (Tabel 6). Peningkatan ini dimungkinkan karena adanya pembelian baru oleh pemerintah dan juga sapi pengembalian yang dikreditkan kembali. Penerapan manajemen yang baik seperti pengorganisasian, administrasi kredit yang ketat dan ditunjang kondisi lapangan yang memungkinkan merupakan faktor pendukung secara langsung dalam menunjang keberhasilan program BPSD di daerah Lampung.

KASUS PENGEMBANGAN PETERNAKAN SAPI DAN KERBAU DI PROPINSI JAWA - BARAT

Situasi Pengembangan

Propinsi Jawa-Barat mempunyai luas wilayah 44 012 km² dengan jumlah penduduk 27 489 837 jiwa (Sensus penduduk tahun 1980). Berarti kepadatan penduduk sebesar 625 orang per Km². Wilayah dataran rendah di Utara dan dataran tinggi di bagian Selatan merupakan daerah pemukiman yang padat, sedang daerah pegunungan di Selatan dan Banten agak lebih jarang penduduknya.

Secara nasional, peternakan sapi di Jawa-Barat tidak mempunyai arti yang penting dan kebutuhan sapi potong untuk daerah ini dipenuhi terutama oleh propinsi-propinsi lain di pulau Jawa.

Persentase yang cukup besar dari populasi kerbau di Indonesia terdapat di Jawa-Barat. Peranan ternak kerbau sebagai ternak kerja dan ternak penghasil daging cukup penting bagi Jawa Barat meskipun tetap terdapat kekurangan ternak kerbau untuk dipotong dari tahun ke tahun yang dipenuhi terutama oleh Jawa-Tengah. Gambaran perkembangan sapi dan kerbau serta sebarannya diperlihatkan pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 6. Perkembangan Program BPSD di Propinsi Lampung

	Jumlah Desa Lokasi	Jumlah Sapi (ekor)	Jumlah Pengaduh (orang)	Rata-rata Jumlah ternak (ekor) per pengaduh
I. Awal Program 1972/1973	5	178	—	—
II. Tahun-tahun Akhir				
1978/1979	—	5504	3749	1.468
1979/1980	124	5782	3953	1.463
1980/1981	132	5922	4042	1.465

Sumber : Inspektorat Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung.

Tabel 7. Perkembangan Populasi Sapi dan Kerbau di Jawa Barat

Sumber Data/Tahun	Sapi (00 ekor)	Kerbau (00 ekor)
1. Survey Inventarisasi Hewan	1449	5922
2. Sensus Pertanian, 1973 (BPS)	1354	4867
3. Survey Pertanian, 1975 (BPS)	1295	4740
4. Survey Pertanian, 1976 (BPS)	1297	4731
5. Laporan Dinas Peternakan 1979/1980	1256	4533
6. Laporan Dinas Peternakan 1980/1981	1267	4454

Tabel 8. Sebaran Populasi Sapi dan Kerbau di Jawa-Barat pada Tahun 1980/1981

Kabupaten	Jumlah penduduk per km ²	Jumlah Sapi (ekor)	Kepadatan Sapi (ekor per km ²)	Jumlah Kerbau (ekor)	Kepadatan Kerbau (ekor per km ²)
1. Pandeglang	290	39	0.02	29128	12.12
2. Lebak	223	204	0.07	32409	10.58
3. Serang	651	96	0.06	51622	30.28
4. Tangerang	1191	5490	3.58	39926	31.14
5. Bogor	872	9654	3.37	30906	10.79
6. Sukabumi	456	429	1.28	31995	9.61
7. Cianjur	289	2771	0.58	21155	4.40
8. Cirebon	1350	159	0.02	14435	1.46
9. Majalengka	746	2576	2.14	11400	9.47
10. Kuningan	724	9726	8.95	15621	14.38
11. Indramayu	619	7290	3.64	29364	14.68
12. Purwakarta	471	7412	0.76	11399	1.17
13. Karawang	716	7275	4.21	10266	5.94
14. Bekasi	714	5530	3.46	12243	7.65
15. Subang	519	14322	6.99	17924	8.74
16. Bandung	843	1306	0.41	13548	4.26
17. Sumedang	482	22837	15.06	8731	5.76
18. Garut	539	1480	0.54	11926	4.34
19. Tasikmalaya	599	8379	3.15	30824	11.58
20. Ciamis	533	16714	6.51	18849	7.34

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Jawa-Barat.

Kegiatan-kegiatan Pengembangan

Gambaran Umum Kegiatan

Beberapa hal penting yang berhubungan dengan pengembangan peternakan sapi dan kerbau di Jawa-Barat yaitu;

1. Mempertahankan populasi ternak sapi dan kerbau melalui proyek-proyek kesehatan hewan.
2. Kegiatan penyebaran ternak sapi dan terutama kerbau dilakukan secara terbatas.
3. Dalam pembinaan mutu bibit sapi dan kerbau, inseminasi buatan merupakan kegiatan yang memperoleh anggaran cukup besar.
4. Pembibitan ternak sapi dan kerbau dilakukan secara terbatas dengan cara menyebarkan sapi dan kerbau kepada peternak-peternak tertentu yang dianggap potensial.
5. Pembibitan kebun rumput di Jatiwangi (Cirebon) dan Cikole (Lembang) sudah dapat memenuhi permintaan bibit tanaman makanan ternak yang sifatnya masih terbatas.
6. Dalam usaha peningkatan penyediaan hijauan terlihat pula perintisan-perintisan dalam bentuk mengaitkannya dengan program peng-

hijauan, pemanfaatan limbah pertanian dan penanaman hijauan makanan ternak yang melibatkan peternak.

Kegiatan Penyebaran Ternak sapi dan kerbau

Kegiatan penyebaran ternak sapi dan kerbau yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini diperlihatkan pada Tabel 9.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini:

1. Kegiatan penyebaran melalui proyek pembibitan sapi potong terbatas sekali, tetapi mencakup hampir seluruh Kabupaten. Demikian juga halnya dengan ternak kerbau penyebarannya lebih terbatas lagi yang hanya dilakukan di 8 Kabupaten.
2. Penyebaran sapi dan kerbau melalui Bantuan Presiden masing-masing meliputi 11 dan 6 Kabupaten.
Perkembangan sapi Ongole Banpres terlihat bahwa;
 - a. Jumlah perubahan dari pembelian untuk Kabupaten-Kabupaten Sumedang, Sukabumi dan Subang terjadi suatu penyebaran

yang semakin meluas yang tidak diperlihatkan Kabupaten lain.

- b. Jumlah yang mati/dipotong/dijual yang sangat tinggi di Kabupaten Kuningan menunjukkan indikasi program penyebaran yang tidak berhasil untuk berlanjut dan meluas.
- c. Persentase kelahiran yang memuaskan hanya terlihat di Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka. Di kabupaten Kuningan Subang dan Cirebon terlihat angka kelahiran yang rendah.

Perkembangan sapi Banpres yang berasal dari import terlihat;

- a. Jumlah penambahan dari pembelian yang tinggi hanya terlihat di Kabupaten Tasikmalaya. Angka yang paling rendah terdapat di Kabupaten Ciamis.

- b. Angka jumlah yang mati/dipotong/dijual nampaknya tidak menunjukkan indikasi berkurangnya jumlah ternak yang termasuk program Banpres.
- c. Persentase kelahiran masih dalam kisaran yang dapat ditolerir kecuali untuk Kabupaten Cirebon.

Sedangkan perkembangan ternak kerbau Banpres memperlihatkan;

- a. Di tiap Kabupaten terlihat adanya penambahan dari pembelian yang cukup nyata.
- b. Angka jumlah yang mati/dipotong/dijual juga tidak menunjukkan indikasi surutnya program penyebaran.
- c. Secara umum persentase kelahiran terlihat lebih rendah. Persentase kelahiran yang memuaskan hanya terlihat di Kabupaten Cianjur sedangkan persentase kelahiran yang sangat rendah diperlihatkan oleh Kabupaten Tangerang.

Tabel 9. Penyebaran Ternak Sapi dan Kerbau oleh Pemerintah di Propinsi Jawa Barat, 1974 - 1980

Kabupaten	Sapi Potong (ekor)										Kerbau (ekor)												
	1974/1975		1975/1976				1976/1977		1977/1980		1980/1981		1974/1975		1976/1977		1977/1978		1979				
	APBD		CESS		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD				
	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B	J	B			
1. Pandeglang	2	8	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	
2. L e b a k	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	
3. Serang	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	
4. Tangerang	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
5. Bogor	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. Sukabumi	2	6	9	96	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. Cianjur	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Cirebon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. Majalengka	1	7	—	—	—	10	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Kuningan	1	7	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. Indramayu	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4	36	—	—	—	—	—
12. Purwakarta	2	8	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Karawang	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	20	—	—	—	—	—
14. Bekasi	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15	—	—	—	—	—
15. Subang	—	10	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. Bandung	—	—	—	—	—	6	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. Sumedang	—	122	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. G a r u t	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. Tasikmalaya	1	6	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. Ciamis	—	10	5	54	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—
Jumlah	13	212	15	158	—	200	2	130	3	18	—	20	2	18	29	71	44	—	—	1	—	—	4

Keterangan : J = Jantan; B = Betina.

Sumber : Dinas Peternakan Dati I Propinsi Jawa Barat.

Kegiatan Pengembangan di Kabupaten Sukabumi

Arah Pengembangan

Sebaran populasi sapi dan kerbau yang sejak dulu terkonsentrasi di bagian selatan Sukabumi merupakan faktor penting dalam penetapan wilayah pengembangan untuk kedua macam ternak tersebut. Di bagian Selatan Sukabumi dengan kepadatan penduduk yang rendah dan persentase lahan kritis yang tinggi, arah pengembangannya lebih ditekankan pada konservasi sumber-sumber alamnya.

Sebaran populasi sapi dan kerbau pada saat ini diperlihatkan pada Tabel 10.

Wilayah pengembangan sapi seperti terlihat masih terbatas di beberapa Kecamatan bagian Selatan meskipun direncanakan untuk lebih meluaskan ke beberapa Kecamatan di bagian Tengah. Wilayah pengembangan untuk ternak kerbau juga masih terbatas pada kecamatan-kecamatan di bagian Selatan meskipun diusahakan juga pengembangannya di kecamatan-kecamatan bagian Tengah. Berbeda dengan ternak sapi, maka dalam pengem-

banagan ternak kerbau penekanannya terletak dalam hal mempertahankan populasi yang ada.

Kegiatan Pengembangan

Dalam pengembangan ternak sapi dan kerbau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara garis besar searah dengan kegiatan yang dilakukan pada tingkat propinsi.

Pokok-pokok kegiatan yang terpenting meliputi :

1. Mempertahankan populasi ternak sapi dan kerbau melalui proyek-proyek kesehatan hewan.
2. Kegiatan-kegiatan terbatas dalam penyebaran ternak sapi dan kerbau. Dalam hal ternak sapi, penyebaran ditujukan untuk penambahan bibit dan peningkatan mutu dan juga sebagai introduksi peternakan sapi.
3. Pelaksanaan IB terutama untuk ternak sapi walaupun belum terlihat begitu meluas.
4. Pengadaan dan pembibitan hijauan makanan ternak telah sejak lama diintroduksikan tetapi belum terlihat dipraktekkan.

Tabel 10. Populasi dan Kepadatan Ternak Sapi dan Kerbau Tiap Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, 1982

Kecamatan	Populasi		Kepadatan ternak	
	Sapi (ekor)	Kerbau (ekor)	Sapi (ekor/Km ²)	Kerbau (ekor/Km ²)
1. Sukabumi	—	213	—	4.40
2. Sukaraja	—	405	—	3.88
3. Cisaat	—	200	—	4.02
4. Baros	3	271	0.09	8.14
5. Cibadak	3	314	0.03	2.89
6. Cikembar	4	637	0.04	5.67
7. Cikidang	—	373	—	1.86
8. Nagrak	2	364	0.02	3.87
9. Cicurug	—	83	—	1.61
10. Parungkuda	—	476	—	4.98
11. Kalapanunggal	—	333	—	1.28
12. Pelabuhan Ratu	2	1395	0.01	8.55
13. Cisolok	—	747	—	2.79
14. Warungkiara	—	1244	—	6.72
15. Jampang Tengah	56	2150	0.18	7.06
16. Nyalindung	—	1116	—	4.53
17. Sagaranten	70	6658	0.17	16.44
18. Jampang Kulon	330	3197	1.88	18.18
19. Lengkong	35	2190	0.14	9.05
20. Surade	3424	4745	7.56	10.48
21. Ciemas	257	1981	0.73	5.62
	4186	29092	1.06	7.36

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

c. Kegiatan Penyebaran.

Keadaan jumlah ternak sapi APBD dan Cess pada tahun 1982 diperlihatkan pada Tabel 11.

Volume penyebaran sapi gaduhan yang bersumber dari APBD baru terlihat dalam jumlah yang cukup tinggi pada tahun terakhir sedang yang bersumber dari Cess penyebaran tahun 1975 sejumlah 115 ekor.

Sapi dan kerbau Banpres disebarkan dengan cara kredit di Kecamatan-kecamatan Surade, Jampang Kulon dan Sagaranten dengan jumlah sapi pokok mula-mula sebanyak 100 ekor. Program penyebaran ini telah dapat mengeluarkan kredit-kredit sapi dan kerbau yang baru dari hasil cicilan peternak yang dibayar melalui BRI Unit Desa. Dengan jangka waktu kredit selama 24 bulan ternyata kredit dapat cepat berputar dibandingkan dengan cara penggadahan yang berjangka waktu sekitar 5 tahun.

Program penyebaran sapi dan kerbau melalui RCP baru mulai dilaksanakan tahun 1982. Sebanyak 200 ekor sapi PO yang didatangkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta telah disebarkan di Surade, Jampang Kulon, Ciemas dan Pelabuhan Ratu. Ternak kerbau direncanakan disebarkan di Sagaranten, tetapi data yang terakhir menunjukkan jumlah pemberian kredit yang hanya 16 ekor kerbau dan persoalannya disebabkan karena kesulitan petani dalam hal agunan kredit.

KESIMPULAN.

Hasil-hasil dan kesimpulan terpenting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pada tingkat nasional, perkembangan sapi dan kerbau yang kurang memuaskan telah menimbulkan respon yang kuat untuk menanggulangnya. Selama beberapa tahun terakhir dapat dikatakan bahwa strategi pengembangan ternak sapi dan kerbau telah memasuki tahapan baru dimana terlihat merupakan komponen yang penting.
2. Peningkatan kegiatan penyebaran ternak sapi yang berarti pelaksanaan program ekstensifikasi secara nyata mempunyai sasaran utama wilayah-wilayah potensial di luar Jawa.
3. Peranan pemerintah dalam pengadaan dan penyebaran ternak bibit bersifat esensial dan pola pengelolaannya diarahkan untuk: (a) pelaksanaan operasional dalam pengadaan dan penyebaran yang efektif dan efisien; (b) pelaksanaan yang memberikan dampak proyek yang maksimal.
4. Pembinaan dan pengembangan peternakan di daerah transmigrasi masih memerlukan keterpaduan dalam program kegiatan terutama antara Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan.

Tabel 11. Keadaan Jumlah Ternak Sapi APBD dan Cess di Kabupaten Sukabumi, tahun 1982

	Jumlah ternak (ekor)				Kecamatan
	Sapi anak		Sapi Dewasa		
	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
I. APBD					
APBD/67/PO	2	—	—	6	Surade
APBD/75/PO	2	1	1	10	Surade
APBD/81/PO	—	—	—	12	Jampang Kulon
APBD/82/BC*	—	1	—	97	Surade
II. CESS/75/PO	13	7	17	106	Surade dan Jampang Kulon

*) BC = Brahman Cross (asal import).

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi.

5. Kasus Propinsi Lampung sebagai penyebaran yang dinilai berhasil programnya, diduga kunci keberhasilannya terletak dalam pengorganisasian dan pengelolaannya yang mantap yang dituangkan dalam bentuk "Bimbingan Peternak Sapi Daging" (BPSD).
6. Penyebaran ternak sapi dilakukan secara terbatas di Propinsi Jawa-Barat dan dikonsentrasikan ke sekitar 11 Kabupaten yang dinilai potensial. Pengalokasian penyebaran sapi saat ini terlihat belum mencukupi terutama untuk wilayah pengembangan Jawa-Barat Selatan yang diprioritaskan untuk pengembangan peternakan.
7. Ternak kerbau yang merupakan harta produktif yang cukup berarti bagi propinsi Jawa-Barat situasinya cenderung menunjukkan kurang berhasilnya program yang dilancarkan untuk mengatasi masalah-masalah persisten yang berhubungan dengan tingkat reproduksi dan tingkat kematian yang kurang memuaskan. Dengan cara pemeliharaan yang ekstensif perkembangan populasi kerbau cenderung terhambat dengan makin intensifnya pola penggunaan lahan.
8. Kemampuan Dinas Peternakan untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan yang terbatas telah mengakibatkan dilakukannya upaya-upaya khusus dalam penyuluhan dan pelayanan untuk menunjang program penyebaran sehingga hal ini dapat berarti kurang diperhatikannya ternak-ternak di luar program atau luar wilayah kerja program.